

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2014 merupakan strategi pemerintah agar inovasi dapat dibudayakan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 “inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada”<sup>1</sup>. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”<sup>2</sup>.

Inovasi pelayanan publik dapat dikatakan sebagai implementasi dari keputusan kebijakan yang telah direncanakan, sebab munculnya inovasi pelayanan publik harus melewati proses perumusan kebijakan yang panjang. Implementasi kebijakan merupakan tindakan berupa pelaksanaan dari rencana kebijakan yang telah ditentukan dengan tujuan menimbulkan suatu dampak atau hasil dari keinginan yang dikehendaki<sup>3</sup>. Proses implementasi kebijakan dalam organisasi sektor publik diharapkan mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan publik, sehingga implementasi akan menimbulkan dua kemungkinan, yaitu menyelenggarakan atau mengakhiri suatu kegiatan. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan salah satu tindakan yang dapat

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1.

<sup>3</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : AIPI, 2006) hlm. 26.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu cita-cita negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang bersemangat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pada tahun 2021, Kabupaten Gresik melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkontribusi memunculkan dan mengimplementasikan kebijakan publik, Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (Sigap-RTLH). Kebijakan ini merupakan upaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk “menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota”<sup>4</sup>. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bahwa “rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya”<sup>5</sup>. Rumah merupakan kebutuhan dasar warga negara untuk berteduh dari panas dan hujan maka diperlukan penataan kembali RTLH untuk mencapai persyaratan kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota, terdapat beberapa syarat agar rumah dapat digolongkan sebagai hunian yang layak, yaitu syarat keselamatan bangunan terpenuhi, syarat kesehatan penghuni terpenuhi, dan syarat luas minimum terpenuhi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan menyebutkan bahwa “Rumah Tidak Layak Huni

---

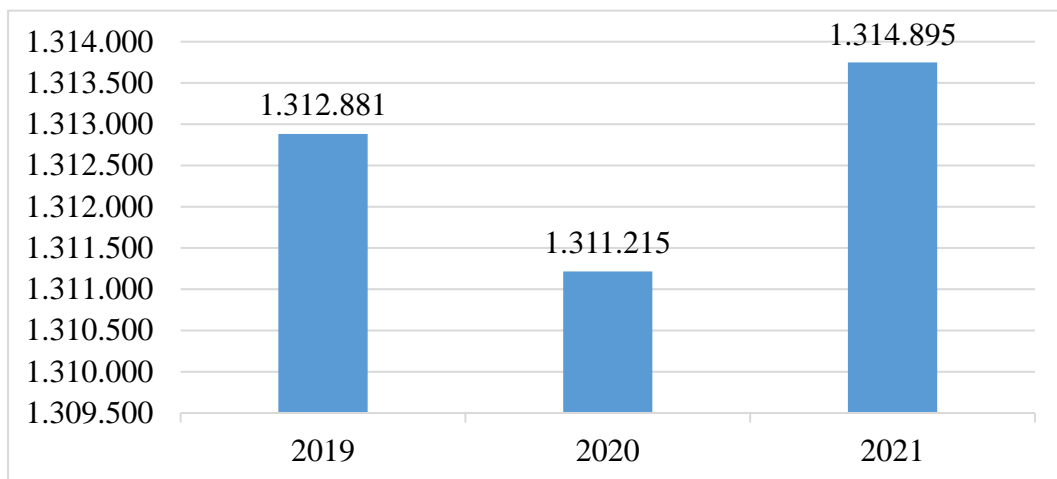
<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 18A.

<sup>5</sup> Peraturan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pasal 1 ayat 5.

yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial”<sup>6</sup>.

Sebelum kemunculan kebijakan Sigap-RTLH, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Gresik terlebih dahulu telah mengimplementasikan Program RTLH. Pada dasarnya, awal keberjalanan program RTLH dilandasi oleh padatnya jumlah penduduk di Kabupaten Gresik sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan situasi dan kondisi setiap manusia yang tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat hunian, dan sebagainya. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat Gresik memiliki keterbatasan biaya untuk menempati rumah yang nyaman, sehat, dan layak huni<sup>7</sup>. Berikut disajikan data jumlah penduduk Kabupaten Gresik kemudian didukung dengan data jumlah penduduk miskin sebagai berikut:

Diagram 1. 1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik



Sumber : BPS Gresik tahun 2021

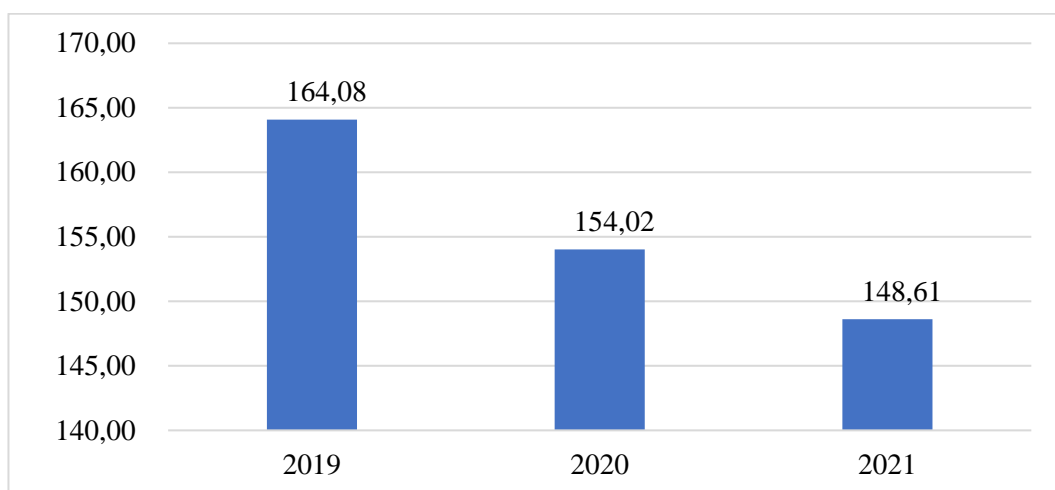
Data di atas menyajikan jumlah penduduk di Kabupaten Gresik dari tahun 2019-2021. Terlihat pada tahun 2020 mengalami penurunan di angka 1.311.215

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan, Pasal 1 ayat 1.

<sup>7</sup> <https://perkim.gresikkab.go.id/main/detail/48> (diakses 6 Oktober 2021).

ribu jiwa dari jumlah total tahun sebelumnya, yaitu 1.312.881 ribu jiwa dengan selisih 1.666 ribu jiwa. Namun, jumlah tersebut kembali naik sebesar 3.680 ribu jiwa pada tahun 2021. Salah satu faktor yang menyebabkan naiknya jumlah penduduk karena Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah padat industri di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Gresik dianggap mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini mendorong terjadinya perpindahan penduduk dari luar kota Gresik dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya. Namun, realita yang terjadi adalah tidak semua penduduk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena persaingan yang semakin ketat. Permasalahan ini menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik menjadi tinggi. Adapun datanya sebagai berikut:

Diagram 1. 2 Data Penduduk Miskin Kabupaten Gresik



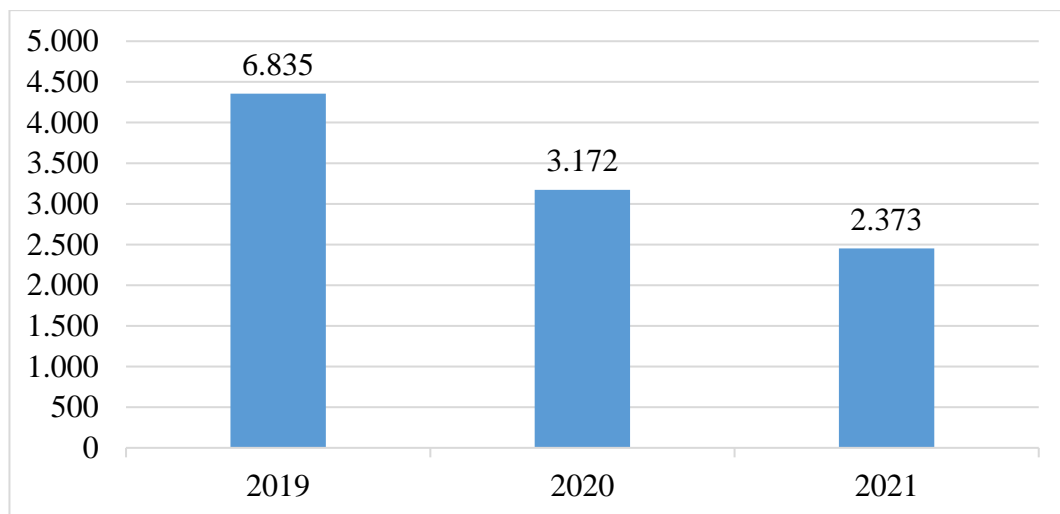
Sumber : BPS Gresik tahun 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Gresik konsisten untuk menurunkan angka penduduk miskin. Hal ini dibuktikan pada tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin masih berada di angka 164,08 jiwa. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Gresik mampu melakukan penekanan hingga mengalami penurunan di angka 10,06 ribu jiwa pada tahun 2020. Dengan demikian, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin berada di angka

154,02 jiwa. Selanjutnya dari tahun 2020 ke 2021, jumlah penduduk miskin menurun sekitar 5,41 ribu jiwa. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun dengan dengan pencapaian tertinggi karena mampu menekan jumlah penduduk miskin hingga angka 10,06 ribu jiwa. Walaupun grafik di atas menunjukkan keberhasilannya untuk mengentas masalah kemiskinan di Kabupaten Gresik namun, angka 148,61 ribu jiwa masih terbilang banyak sehingga dibutuhkan terobosan-terobosan baru untuk mengatasinya.

Setelah membahas dan menjabarkan data penduduk miskin dari tahun 2019-2021 maka selanjutnya, disajikan data hunian penduduk miskin di Kabupaten Gresik yang tergolong dalam rumah tidak layak huni sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pembangunan untuk mencapai kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup. Adapun data RTLH pada tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Diagram 1. 3 Data RTLH Kabupaten Gresik

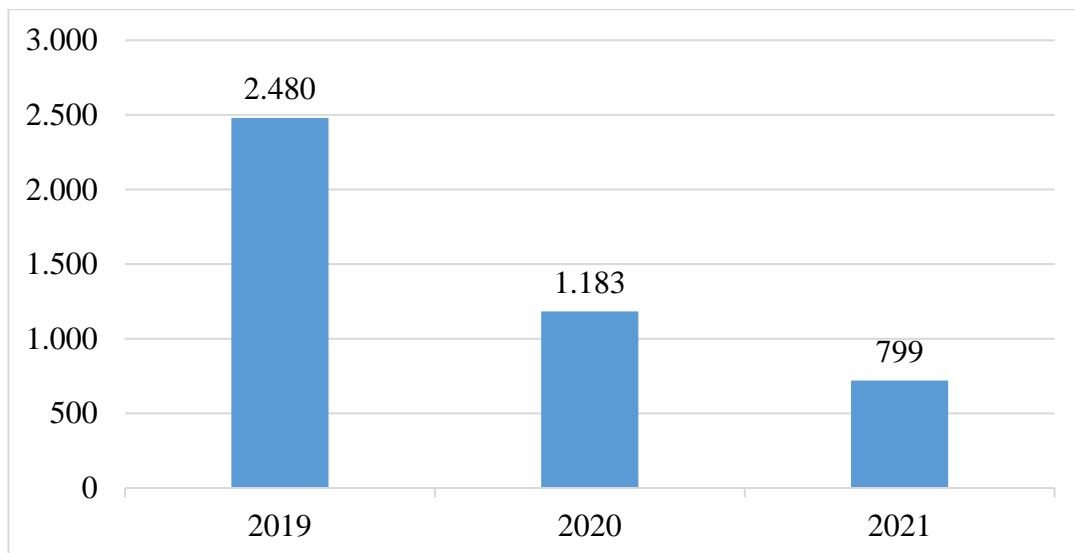


Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

Data di atas menyajikan jumlah RTLH pada tahun 2019-2021 Kabupaten Gresik. Grafik tersebut menunjukkan konsistensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam

mengentas permasalahan RTLH. Terlihat bahwa setiap tahunnya, pemerintah mampu sedikit demi sedikit menekan angka RTLH. Meskipun demikian, pencapaian ini belum maksimal karena penduduk dengan RTLH yang belum tertangani masih tergolong banyak. Oleh karenanya, program perbaikan RTLH digunakan untuk menangani permasalahan RTLH di Kabupaten Gresik yang cukup krusial. Adapun data RTLH yang telah tertangani dari tahun 2019-2021 dengan rincian berikut ini:

Diagram 1. 4 Jumlah RTLH yang Tertangani Tahun 2019-2021



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan RTLH. Jumlah hunian yang telah tertanggulangi dari tahun 2019-2021 adalah sebanyak 4.462 unit rumah dengan jumlah perbaikan tertinggi pada tahun 2019 yang mencapai 2.480 unit. Adapun dari data di atas dapat diketahui jumlah RTLH yang belum tertangani sebanyak 2.373 unit rumah. Namun, implementasi kebijakan program RTLH yang diterapkan hingga tahun 2020 masih mengalami beberapa permasalahan seperti banyaknya RTLH yang belum tertangani karena data cenderung terbatas, tidak lengkap, dan tidak valid; kesulitan mendeteksi *double*

data penerima bantuan dalam 1 KK, desa belum mempunyai sistem tata kelola data RTLH yang baik<sup>8</sup>. Sementara itu, data RTLH memiliki peranan penting sehingga jika data bermasalah maka dapat menimbulkan kesalahan dalam penyusunan prioritas perencanaan pembangunan dan pendanaan RTLH. Oleh karenanya, kehadiran kebijakan Sigap-RTLH di tahun 2021 di desain dengan berbasis web dan android yang merupakan proses pembaruan dari pelaksanaan program RTLH sebelumnya. Sigap-RTLH diharapkan mampu menjadi sebuah solusi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada agar bantuan pembangunan RTLH dapat dialokasikan secara tepat.

Pemerintah dapat melakukan pendataan dan pemutakhiran data RTLH melalui sistem tersebut sehingga membantu mempercepat perbaikan rumah masyarakat dengan tepat sasaran, tepat penganggaran, dan tepat waktu. Didukung dengan 5 keunggulan yang dimiliki oleh Sigap-RTLH, yaitu pertama, telah terintegrasi dengan 303 desa, 26 kelurahan, dan 18 kecamatan. Kedua, telah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengetahui kebenaran dan keakuratan data penerima bantuan RTLH. Ketiga, telah terintegrasi dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik Dinas Sosial untuk menginformasikan tentang masyarakat yang perlu diberikan bantuan kesejahteraan. Keempat, terintegrasi dengan Dinas Kesehatan terkait data rumah sehat. Terakhir, mempunyai fitur prioritas penanganan yang mampu memberikan informasi rumah yang harus didahulukan untuk diperbaiki<sup>9</sup>.

Selain sistem yang mendukung, sinergitas dan koordinasi yang baik antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga sangat dibutuhkan. Setiap OPD dituntut untuk melaksanakan masing-masing tugas dan tanggung jawab yang telah diterima agar mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kinerja OPD sangat menentukan keberjalanan dan keberhasilan Sigap-RTLH. OPD dapat dikatakan menjadi pilar utama sebagai penggerak pelaksanaan Sigap-RTLH sehingga pemberian tugas

---

<sup>8</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=iVvPdQ1DDSS8> (diakses 7 November 2021).

<sup>9</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=PB7krx2yrx0> (diakses 6 Oktober 2021).

harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Kedua hal tersebut sangat berguna untuk membantu OPD dalam mengimplementasikan program sehingga dapat meminimalisir permasalahan. Keadaan dimana OPD belum cukup memiliki kemampuan dan keahlian telah terbukti dengan munculnya permasalahan-permasalahan pada implementasi Program RTLH sebelumnya, yang kemudian mendorong dibentuknya program baru, yaitu Sigap-RTLH. Adapun OPD yang berkontribusi dalam implementasi Sigap-RTLH, yaitu kepala dinas perumahan dan permukiman, kepala bidang kawasan permukiman, kepala seksi pendataan dan perencanaan rumah swadaya, admin sigap-RTLH, anggota, TFL, kepala desa dan perangkat (masing-masing desa).

Kemudian, dukungan dari aspek anggaran juga memegang peranan penting. Adanya bantuan OPD dalam membantu mengimplementasikan program akan sia-sia jika tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Apalagi ini merupakan program perbaikan RTLH sehingga anggaran sangat berguna untuk keberjalanannya dan dapat dipastikan program tidak berjalan jika tidak ada anggaran. Setiap tahunnya, Pemerintah Gresik mampu menyediakan dana besar karena mendapatkan dari berbagai sumber seperti DAK (Dana Alokasi Khusus), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan optimalisasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang ada<sup>10</sup>. Pemerintah Gresik telah menetapkan anggaran untuk perbaikan setiap rumah maksimal Rp. 30.000.000,00. Dengan demikian, jika setiap rumah mendapatkan anggaran maksimal untuk perbaikan rumah maka jumlah anggaran yang dikeluarkan dari tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=iVvPdQ1DD58> (diakses 7 November 2021).



Tabel 1. 1 Anggaran RTLH yang Tertangani Tahun 2019-2021

Tahun	Unit Rumah yang Tertangani	Anggaran (Anggaran setiap rumah x unit rumah)
2019	2480 unit rumah	Rp. 30.000.000 x 2480 unit rumah = Rp. 74.400.000.000
2020	1183 unit rumah	Rp. 30.000.000 x 1183 unit rumah = Rp. 35.490.000.000
2021	799 unit rumah	Rp. 30.000.000 x 799 unit rumah = Rp. 23.970.000.000

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

Dari penjelasan yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap inovasi Sigap-RTLH yang telah digagas oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, bagaimana pemerintah mengimplementasikan inovasi tersebut baik dari aspek penganggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul saat Sigap-RTLH dilaksanakan. Oleh karenanya, hal ini dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gresik Tahun 2021-2022 (Tinjauan dari Aspek Penganggaran dan Sumber Daya Manusia)”.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi Sigap-RTLH?
2. Apa permasalahan-permasalahan yang muncul ketika Sigap-RTLH dilaksanakan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi program Sigap-RTLH khususnya dari aspek penganggaran dan sumber daya manusia.

2. Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul ketika program Sigap-RTLH dilaksanakan dan solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Bagi kepentingan akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah Ilmu Pemerintahan, berkaitan dengan pengimplementasian inovasi Sigap-RTLH yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik ditinjau dari aspek penganggaran dan sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Instansi**

Memberikan kontribusi pemikiran kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dalam menjalankan inovasi yang telah dibentuk, yaitu Sigap-RTLH dengan mempertimbangkan aspek penganggaran dan sumber daya manusia sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penyediaan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada berbagai dinas pemerintah di Kabupaten Gresik dalam menjalankan sebuah program atau kegiatan yang direncanakan.

###### **b. Bagi Peneliti**

Dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang sebenarnya dalam mengimplementasikan sebuah inovasi khususnya Sigap-RTLH yang diterapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dengan meninjau dari aspek penganggaran dan sumber daya manusia.

## 1.5 Landasan Teori

### 1.5.1 Implementasi Kebijakan

Berdirinya suatu negara pasti diiringi oleh munculnya permasalahan-permasalahan publik. Semakin tinggi jumlah populasi penduduk maka semakin kompleks pula kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu sehingga berpengaruh terhadap keanekaragaman permasalahan yang terjadi. Menanggapi hal tersebut, pemerintah yang bertugas sebagai penggerak roda pemerintah suatu negara maka diharuskan untuk mencari solusi dengan menyediakan pelayanan bagi publik. Pelayanan publik adalah kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditentukan dengan tujuan menciptakan kepuasan kepada penerima layanan<sup>11</sup>. Pelayanan juga diartikan sebagai suatu kegiatan instansi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>12</sup>. Pelayanan publik dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan tugas pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk merumuskan suatu kebijakan bagi keberjalanan suatu negara. Perumusan kebijakan diharapkan mampu memenuhi dan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kebijakan yang telah disusun dan direncanakan biasanya akan diimplementasikan menjadi program atau kegiatan pelayanan publik.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses atau cara menghasilkan dan melaksanakan kebijakan publik yang telah disusun, direncanakan, dan ditetapkan kedalam sebuah aktivitas sesuai dengan target kebijakan<sup>13</sup>. Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Michael Hill and Peter Hupe bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah proses menyusun serangkaian keputusan yang diarahkan untuk melaksanakan dan menegakkan tujuan yang ingin dicapai

---

<sup>11</sup> Rahman Mulyawan, *Birokrasi dan Pelayanan Publik*, (Sumedang : Unpad Press, 2016) hlm. 33.

<sup>12</sup> Dahyar Daraba, *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik*, (Parang : Leisyah, 2019) hlm. 194.

<sup>13</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : AIPI, 2006) hlm. 24.

melalui sebuah kebijakan<sup>14</sup>. Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari dua pengertian tersebut, bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh organisasi publik maupun swasta dengan harapan mampu mencapai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>15</sup>. Proses tersebut dapat berupa melakukan atau memberhentikan suatu tindakan. Implementasi kebijakan bukan hanya berbicara mengenai keberhasilan dan kegagalan namun, kinerja yang tepat untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan merupakan karakteristik utamanya. Oleh karenanya, kegagalan implementasi mengacu pada ketidakmampuan lembaga atau organisasi untuk menindaklanjuti karena kinerja yang tidak tepat.

Terkait dengan beberapa pengertian di atas, Sigap-RTLH dapat dikategorikan sebagai hasil dari perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dengan bentuk program penyediaan layanan publik. Adanya Sigap-RTLH merupakan keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu dalam konteks ini adalah menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi ketika Program RTLH diterapkan. Sigap-RTLH dikemas menjadi sebuah program berbasis teknologi sehingga mampu untuk mempercepat pelayanan kebutuhan masyarakat dalam segi perbaikan rumah tidak layak huni baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Hal ini juga sebagai upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengambilan keputusan untuk mengimplementasi sebuah kebijakan yang telah disusun tidak serta merta muncul, sebab kebijakan diciptakan untuk mencapai suatu target dari rencana yang telah dibuat, dalam organisasi publik lebih mengarah untuk memenuhi kebutuhan maupun menyelesaikan permasalahan yang ada. Penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan implementasi kebijakan Sigap-RTLH di Kabupaten

---

<sup>14</sup> Michael Hill and Peter Hupe, *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*, (California : Sage Publications, 2002) hlm. 142.

<sup>15</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, (Columbus : Sage Publications, 1975) hlm. 448.

Gresik. Faktor-faktor yang ingin dibahas tidak terbatas pada tujuan kebijakan, sumber daya, dan komunikasi yang dibangun namun, penelitian ini juga ingin membahas lebih dalam pengaruh implementasi Sigap-RTLH terhadap kondisi di Kabupaten Gresik. Oleh karenanya, penelitian ini lebih tepat menggunakan teori dari Donald S. Van Meter Carl E. Van Horn tentang implementasi kebijakan. Adapun pendapat Donald S. Van Meter Carl E. Van Horn yang mengemukakan setidaknya terdapat enam variabel, sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Standar dan tujuan kebijakan

Pada dasarnya, standar dan tujuan merupakan variabel yang menjelaskan, menjabarkan, dan menguraikan seluruh target tujuan dari keputusan kebijakan yang akan dan telah dibuat. Standar dan tujuan kebijakan menjadi aspek penting untuk melihat dan menganalisis kinerja para pelaksana kebijakan. Kebijakan yang telah tersusun secara baik dan tepat bisa mengalami permasalahan atau hambatan yang menyebabkan kegagalan dalam implementasinya ketika pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya memahami standar dan tujuan kebijakan.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya sekedar tentang standar dan tujuan kebijakan. Disisi lain, sumber daya juga menjadi salah satu aspek penting. Manusia merupakan sumber daya yang paling utama. Setiap tahapan implementasi kebijakan sangat membutuhkan kontribusi manusia yang berkualitas sebagai pelaksana. Berkualitas yang dimaksud adalah kesesuaian kemampuan dan keahlian yang dimiliki manusia dengan kebijakan yang diimplementasikan. Sumber daya dalam implementasi kebijakan tidak hanya mengerucut pada manusia, sumber daya finansial juga tidak kalah penting. Aspek finansial harus terpenuhi, sebab kurangnya finansial maka kebijakan akan sulit untuk diimplementasikan. Dapat

---

<sup>16</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, (Columbus : Sage Publications, 1975) hlm. 462.

dikatakan bahwa sumber daya manusia dan finansial merupakan penyokong untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Jadi, ketika keduanya terhambat maka kemungkinan terburuk yang terjadi adalah kebijakan tersebut gagal untuk diterapkan.

### 3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Keputusan kebijakan pastinya diharapkan mampu terlaksana secara tepat. Hal ini membutuhkan pemahaman dari setiap individu dari pelaksana atas tujuan yang ingin dicapai karena para pelaksana yang terpilih bertanggung jawab penuh atas proses implementasi kebijakan. Dengan demikian, komunikasi di dalam organisasi maupun antar organisasi ke organisasi lain harus terjalin dengan baik untuk menyampaikan informasi tentang tujuan kebijakan secara konsisten dan seragam. Komunikasi tersebut perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya kesalahan informasi yang menyebabkan implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan lancar.

### 4. Karakteristik organisasi pelaksana

Variabel ini diartikan sebagai kualitas yang dimiliki oleh organisasi pelaksana. Maksud dari kualitas tersebut adalah kinerja dari organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga dapat dikatakan bahwa proses implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh baik buruknya kinerja organisasi pelaksana. Biasanya organisasi publik akan bersifat disiplin dan kaku dalam menerapkan suatu kebijakan.

### 5. Disposisi para pelaksana

Disposisi merupakan sikap para pelaksana atas suatu kebijakan yang telah diputuskan. Sikap menerima atau menolak yang ditunjukkan oleh para pelaksana sangat mempengaruhi proses keberjalanan kebijakan tersebut, hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu berhasil atau gagal. Banyak kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan namun, tidak dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan

yang sedang terjadi. Hal ini ditentukan oleh bagaimana para pelaksana menanggapi dan menganalisisnya.

#### 6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Keadaan lingkungan baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik terhadap proses implementasi kebijakan sangat berpengaruh. Lingkungan yang tidak kondusif dan tidak mendukung menjadi sumber munculnya permasalahan, yaitu dapat menyebabkan kegagalan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Oleh karenanya, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik harus diperhatikan secara serius demi keberhasilan kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

### 1.5.2 Aspek Penganggaran

Penganggaran adalah proses atau tahapan yang disusun untuk hasil yang hendak dicapai dalam satu periode tertentu dengan melibatkan aspek keuangan<sup>17</sup>. Penganggaran sebagai penyusunan dan pengelolaan rencana keuangan untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan<sup>18</sup>. Dapat disimpulkan bahwa penganggaran merupakan cara penting untuk mengelola keuangan agar berjalan secara sistematis dan terkontrol sehingga mampu mendukung tercapainya suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran harus bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh pihak untuk diberikan suatu kritikan, masukan, dan pengawasan yang ketat. Tindakan ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan berbagai pihak. Menurut Indra Bastian (2019), terdapat 7 tahapan yang harus dilakukan dalam proses penganggaran sebagai berikut<sup>19</sup>:

#### 1. Perencanaan publik

Perencanaan merupakan langkah-langkah membuat keputusan yang tepat sebagai tindakan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Perencanaan digunakan

---

<sup>17</sup> Anik Yuesti dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, (Bali : Cv. Noah Aletheia, 2020) hlm. 40.

<sup>18</sup> Benjamin Bukit dkk, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Teori, Dimensi Pengukuran, Dan Implementasi Dalam Organisasi*, (Sleman : Zahir Publishing, 2017) hlm. 91.

<sup>19</sup> Indra Bastian, *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2019) hlm. 12.

untuk mencapai hasil tertentu yang telah disepakati. Maka dalam sektor publik perencanaan diartikan sebagai upaya atau langkah untuk mencapai tujuan dalam memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan masyarakat. Proses ini fokus terhadap strategi organisasi sektor publik untuk mewujudkannya.

## 2. Penganggaran publik

Dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik untuk melayani kebutuhan masyarakat, penganggaran menjadi hal yang cukup penting. Anggaran digunakan sebagai perencanaan yang disusun detail oleh organisasi sektor publik atas pendapatan dan pengeluaran. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah pemborosan pengeluaran yang tidak terkendali karena tidak tersusun secara sistematis. Perencanaan anggaran secara rinci juga diperlukan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## 3. Realisasi penganggaran publik

Realisasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Realisasi didukung dengan tindakan dari organisasi sektor publik berupa pelaksanaan program atau kegiatan. Dengan demikian, realisasi penganggaran merupakan proses untuk menjalankan program sebagai perwujudan dari tujuan organisasi sektor publik yang memiliki fokus utama pada proses pendapatan, belanja, dan pengendalian biaya.

## 4. Pengadaan barang/jasa publik

Pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan akan melewati tahap pengadaan barang/jasa publik. Dalam hal ini, barang merupakan benda yang berwujud dan bermanfaat bagi masyarakat, sementara jasa merupakan bentuk pelayanan yang diberikan organisasi sektor publik kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa publik adalah proses penyediaan barang dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat sehingga kesejahteraan pun dapat tercapai.



#### 5. Pelaporan keuangan sektor publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan penjelasan, penjabaran, dan rincian dari setiap pendapatan, belanja, dan biaya yang telah dikeluarkan selama satu periode. Laporan keuangan sektor publik menggambarkan pencapaian program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan ini menjadi tahap penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran sehingga dapat tercipta akuntabilitas sektor publik yang baik.

#### 6. Audit sektor publik

Tahap ini akan melakukan pemeriksaan dan pengujian pada laporan keuangan yang telah dibuat untuk menilai kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan data yang telah diberikan. Dengan demikian, auditor dapat melihat apakah organisasi sektor publik telah melaksanakan program atau kegiatannya dengan penuh tanggung jawab melalui akuntabilitas data yang telah dilaporkan.

#### 7. Pertanggungjawaban publik

Dalam proses anggaran, pertanggungjawaban menjadi hal yang sangat penting. Pertanggungjawaban sektor publik merupakan kewajiban tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Keduanya berhak mengetahui darimana dan digunakan untuk apa anggaran tersebut. Selanjutnya, jika dirasa terjadi penyalahgunaan maka masyarakat berhak mengkritik.

### **1.5.3 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah kemampuan daya pikir dan fisik, perilaku, dan sifat setiap individu<sup>20</sup>. Kemampuan tersebut yang mendorong setiap individu untuk terus berkembang. Sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai kualitas dari setiap manusia yang beragam meliputi kecerdasan, kedisiplinan, kepribadian, dan

---

<sup>20</sup> Benjamin Bukit dkk, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Teori, Dimensi Pengukuran, Dan Implementasi Dalam Organisasi*, (Sleman : Zahir Publishing, 2017) hlm. 2.

sebagainya<sup>21</sup>. Dari dua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia merupakan potensi yang dimiliki setiap individu untuk mewujudkan perannya dengan memanfaatkan seluruh potensi tersebut. Dalam organisasi sektor publik, sumber daya manusia lebih diartikan sebagai pelaksana dalam mencapai tujuan organisasi dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Faktor manusia dalam suatu organisasi menjadi aset yang penting dan berharga. Tentunya juga sebagai modal jangka panjang. Seluruh keberhasilan organisasi sangat tergantung pada kualitas yang dimiliki oleh setiap pegawai. Dengan demikian, pemberian peran dan tanggung jawab pelaksanaan program atau kegiatan harus dilakukan dengan menimbang kemampuan setiap individu. Adapun pendapat Benjamin Bukit dkk (2017) yang menjelaskan terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan dalam pembagian tugas sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Penentuan tugas dan tanggung jawab SDM

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan, penentuan tugas dan tanggung jawab merupakan hal utama yang harus dilakukan. Penentuan tersebut merupakan penetapan tugas dan tanggung jawab yang akan diserahkan kepada pegawai. Hal ini menyangkut proses keberjalanan program atau kegiatan tersebut karena jika aspek tugas dan tanggung jawab tidak sesuai maka hasil yang diperoleh tidak dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

2. Pemberian tugas dan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan kompetensi SDM

Setelah penetapan tugas dan tanggung jawab maka organisasi sektor publik akan mengimplementasikan program atau kegiatannya dengan melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab pekerjaan sesuai kapabilitas SDM. Pembagian ini merupakan pemberian wewenang kepada SDM untuk

---

<sup>21</sup> Hadi Purnomo, *Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Dari Teori Ke Praktik*, (Bantul : CV. Bildung Nusantara, 2017) hlm. 3.

<sup>22</sup> Benjamin Bukit dkk, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Teori, Dimensi Pengukuran, Dan Implementasi Dalam Organisasi*, (Sleman : Zahir Publishing, 2017) hlm. 127.

melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab. Pemberian tugas tersebut dengan menimbang kompetensi dan kapabilitas masing-masing SDM, sebab hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil. Setelah melewati perencanaan tugas dan tanggung jawab, Sigap-RTLH diimplementasikan dengan membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan keahlian SDM. Pertimbangan ini sangat penting dilakukan agar setiap tugas dapat berjalan dengan baik karena dipegang oleh SDM yang berkompeten dalam bidangnya.

### 3. Evaluasi tugas dan tanggung jawab SDM

Secara umum, evaluasi adalah penilaian terhadap suatu kegiatan yang telah dilakukan. Oleh karenanya, evaluasi tugas dan tanggung jawab SDM merupakan pengukuran, penilaian, dan perbaikan terhadap kinerja SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diterima. Hal ini akan menilai apakah program atau kegiatan berjalan sesuai rencana dan berhasil mencapai tujuan tertentu. Setiap tahun, evaluasi kinerja digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi Sigap-RTLH khususnya dari segi anggaran dan sumber daya manusia belum pernah dilakukan semenjak Sigap-RTLH ini diterapkan. Oleh karenanya, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pelayanan publik di Indonesia. Berikut penelitian terdahulu yang ditemukan dan digunakan peneliti, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Teni Listiani dari STIA LAN Bandung yang berjudul “Implementasi Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Di PDAM Kota Bandung)”<sup>23</sup>. Peneliti ini bertujuan untuk

---

<sup>23</sup> Teni Listiani, *Implementasi Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Di PDAM Kota Bandung)*, Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, Vol.4 No.3 (2007).

mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan implementasi pelayanan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan publik. Pelayanan publik yang dibahas oleh peneliti kali ini adalah PDAM Kota Bandung yang bergerak untuk mendistribusikan air bersih khususnya di wilayah Bandung. Peneliti mencoba fokus untuk melihat apakah pelayanan tersebut dapat berjalan secara transparan dan akuntabel dari perspektif pegawai dan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai PDAM telah melakukan pelayanan dengan berpegang pada transparansi. Hal ini diwujudkan dengan tindakan yang dilakukan oleh pegawai PDAM, yaitu mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang berhubungan dengan kepentingan pelanggan. Demikian pula dari segi pembayaran, PDAM telah menjabarkan secara rinci tarif yang harus dibayarkan oleh setiap pelanggan. Dilihat dari akuntabilitas, pegawai PDAM telah melaksanakan tugas dengan baik, yaitu melayani masyarakat dengan disiplin, bertanggung jawab, dan profesional. Selain itu, pegawai PDAM selalu menangani keluhan, kritik, dan saran dari masyarakat untuk dijadikan sebuah evaluasi kinerja para pegawai. Kesamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang implementasi pelayanan publik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rino Sardanto, Restin Meilina, Basthoumi Muslih dari Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berjudul “Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Brand “*Harmoni Kediri The Service City*”<sup>24</sup>. Penelitian ini lebih fokus untuk menganalisis bagaimana implementasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berlandaskan *Harmoni Kediri The Service City Brand*. *City brand* tersebut menjadi identitas Kota Kediri yang berkomitmen untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintah yang diwujudkan dalam penyediaan layanan publik. Hal ini menjadi salah satu strategi Pemerintah Kota Kediri untuk menepis stigma buruk masyarakat yang menganggap bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah selalu melewati proses yang berbelit-belit sehingga memakan biaya, waktu, dan tenaga.

---

<sup>24</sup> Rino Sardanto dkk, *Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Brand “Harmoni Kediri The Service City”*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol, 2 No. 2 (2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *brand* tersebut mampu mempengaruhi perubahan kualitas kinerja pegawai Dispendukcapil Kota Kediri dalam melayani masyarakat. Dapat dilihat dari mekanisme, persyaratan, proses, serta pemenuhan fasilitas pelayanan yang lebih baik. Persamaan dengan penelitian ini adalah desain penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Saudahwati Wati dari Widyaiswara BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjudul “Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Melalui Er- Usip (Elektronik Retribusi Pasar) Di Dinas Perindagkop-Ukm Kabupaten Bangka Tengah”<sup>25</sup>. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui apa saja capaian, manfaat, dukungan, serta permasalahan yang muncul saat Er- Usip diimplementasikan pada Pasar Tradisional Kayu Besi Kecamatan Namang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Er-Usip mampu mencapai tujuan dengan adanya pengguna yang memanfaatkan inovasi tersebut untuk pembayaran retribusi pasar. Capaian tersebut selaras dengan beberapa manfaat yang telah direncanakan, yaitu sebagai percepatan pelayanan publik sehingga lebih efektif dan efisien, meminimalisir penyelewengan keuangan, mempermudah pelaksanaan audit. Keberhasilan manfaat yang telah dicapai tidak lepas dari dukungan seluruh pihak yang terkait, seperti pimpinan, pedagang pasar, dan pengelola. Namun, dibalik keberhasilan masih muncul permasalahan yang menjadi hambatan terlaksananya Er-Usip, yaitu gangguan jaringan dan belum tersedianya counter khusus di pasar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta ingin melihat permasalahan yang terjadi ketika mengimplementasi layanan publik.

---

<sup>25</sup> Saudahwati Wati, *Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Melalui Er- Usip (Elektronik Retribusi Pasar) Di Dinas Perindagkop-Ukm Kabupaten Bangka Tengah*, Jurnal Inspirasi, Vol. 10 No. 2 (2019).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas memiliki keterkaitan topik penelitian yang diambil, yaitu implementasi pelayanan publik di Indonesia dengan fokus penelitian yang berbeda-beda. Secara garis besar, hasil dari beberapa penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbaikan implementasi pelayanan publik merupakan sebuah cara pemerintah untuk menyediakan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Oleh karenanya, penelitian ini membahas tentang implementasi Sigap-RTLH di Kabupaten Gresik dengan fokus penelitian baru, yaitu meninjau aspek anggaran dan sumber daya manusia. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan lebih dalam bagaimana kedua aspek tersebut diimplementasikan. Kedua aspek tersebut berpengaruh dalam sebuah proses layanan publik. Pertama adalah anggaran, pemerintah harus menyusun strategi yang tepat untuk mengontrol sumber keuangan sehingga dapat dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan rencana. Anggaran dapat dikatakan sebagai instrumen mendasar yang harus ada. Anggaran berfungsi untuk menyusun seluruh perencanaan biaya suatu kegiatan secara sistematis. Anggaran berisi segala rincian pemasukan dan pengeluaran. Dengan perincian tersebut maka dapat menciptakan transparansi anggaran. Hal ini mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk memonitor keuangan operasional pemerintah.

Beralih pada peran sumber daya manusia (SDM) yang juga menjadi salah satu hal penting. SDM mempengaruhi segala hasil pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus menyiapkan SDM yang berkualitas demi keberjalanan proses pelayanan. Dalam menentukan SDM tersebut, pemerintah perlu memilah dan memilih sesuai dengan kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh SDM. Hal ini bertujuan agar tugas dan wewenang yang diberikan kepada SDM dapat dikerjakan dengan optimal. Diperlukan juga sinergitas antar SDM untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana tujuan. Dengan itu, masyarakat sebagai penerima mendapatkan kepastian dan kepuasan pelayanan.

## 1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep Implementasi Sigap-RTLH

Konsep dan Definisi Konsep	Dimensi Operasional	Indikator
Implementasi kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh organisasi publik maupun swasta dengan harapan mampu mencapai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, 1975).	Standar dan tujuan kebijakan	Menganalisis standar dan tujuan kebijakan dari diimplementasikannya Sigap-RTLH
	Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis sumber daya manusia yang terlibat dalam Sigap-RTLH</li> <li>2. Menganalisis sumber anggaran yang digunakan dalam perbaikan RTLH</li> <li>3. Menganalisis data anggaran perbaikan RTLH</li> </ol>
	Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan	Menganalisis proses komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan Sigap-RTLH
	Karakteristik organisasi pelaksana	Menganalisis kinerja para pelaksana dalam mengimplementasikan Sigap-RTLH

	Disposisi para pelaksana	Menganalisis sikap penerimaan atau penolakan para pelaksana dalam mengimplementasikan Sigap-RTLH
	Kondisi ekonomi, sosial, dan politik	Menganalisis kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap diimplementasikannya Sigap-RTLH
Penganggaran merupakan cara penting untuk mengelola keuangan agar berjalan secara sistematis dan terkontrol sehingga mampu mendukung tercapainya suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan (Indra Bastian, 2019).	Perencanaan publik	Menganalisis proses perencanaan Sigap-RTLH
	Penganggaran publik	Menganalisis proses penyusunan anggaran untuk perbaikan RTLH
	Realisasi penganggaran publik	Menganalisis proses realisasi dari penyusunan anggaran untuk perbaikan RTLH
	Pengadaan barang/jasa publik	1. Menganalisis bentuk anggaran dalam proses perbaikan RTLH 2. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses perbaikan RTLH
	Pelaporan keuangan sektor publik	Pembuatan laporan anggaran yang telah



		digunakan dalam perbaikan RTLH
	Audit sektor publik	Melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan anggaran yang telah digunakan dalam perbaikan RTLH
	Pertanggungjawaban publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis pertanggungjawaban dari anggaran yang telah digunakan dalam perbaikan RTLH</li> <li>2. Memeriksa kebenaran penggunaan anggaran</li> <li>3. Pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan anggaran</li> </ol>
Sumber daya manusia adalah kemampuan daya pikir dan fisik, perilaku, dan sifat setiap individu (Benjamin Bukit dkk, 2017).	Penentuan tugas dan tanggung jawab SDM	Menganalisis keputusan dalam proses penyusunan tugas dan tanggung jawab SDM
	Pemberian tugas dan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan kompetensi SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis proses pemberian tugas dan tanggung jawab SDM</li> <li>2. Pemberian tugas dan tanggung jawab SDM</li> <li>3. Mengontrol kinerja SDM</li> </ol>

		4. Pihak yang mengontrol kinerja SDM
	Evaluasi tugas dan tanggung jawab SDM	1. Menganalisis hasil kinerja SDM 2. Proses perbaikan kinerja SDM 3. Pihak yang terlibat dalam proses perbaikan kinerja

Sumber : Landasan Teori

### 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan data-data yang berguna untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas gejala, kejadian, atau peristiwa yang sedang diteliti<sup>26</sup>. Kegiatan ini berjalan secara sistematis dan terstruktur. Dengan artian, ada beberapa yang harus dilalui oleh peneliti. Hal ini penting untuk diikuti agar tetap berkesinambungan satu dengan lainnya sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian yang *valid*. Penelitian yang dilakukan tidak berfokus pada angka dan numerik sehingga metode penelitian yang lebih tepat untuk digunakan adalah metode kualitatif. Merujuk pada rumusan masalah, metode ini fokus menggali lebih dalam beberapa informasi, yaitu implementasi dari aspek pendanaan, sumber daya manusia, serta permasalahan yang muncul dan solusi yang ditempuh dalam pelaksanaan inovasi Sigap-RTLH di Kabupaten Gresik. Dengan demikian, fenomena atau kejadian yang telah diamati dijelaskan secara rinci sesuai data dan fakta di lapangan.

<sup>26</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm. 02.

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan situasi partisipan dan lingkungan<sup>27</sup>. Penelitian ini mendeskripsikan suatu fakta, gejala, maupun realita yang terjadi menggunakan teks karena penggambaran dalam bentuk angka tidak cukup untuk menangkap peristiwa yang sedang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman baru tentang gejala yang sedang diteliti. Oleh karenanya, penelitian harus dilakukan di tempat yang menjadi fokus penelitian untuk mendapatkan data yang *valid*.

Metode ini digunakan untuk menganalisis serta mendeskripsikan fakta dan realita yang terjadi pada proses implementasi Sigap-RTLH di Kabupaten Gresik dari aspek pendanaan, SDM, serta permasalahan yang muncul dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya. Hasil penelitian dijabarkan berdasarkan data yang diperoleh secara jelas, rinci, dan tidak dibuat-buat melalui teks.

### **1.8.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Alasan memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan fokus penelitian yang telah dilakukan, yaitu untuk mengetahui proses implementasi inovasi Sigap-RTLH di Kabupaten Gresik terutama dalam aspek pendanaan dan sumber daya manusia, serta permasalahan-permasalahan yang muncul ketika program ini dilaksanakan dan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikannya.

### **1.8.3 Sumber Data**

Sumber data merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Sumber data menjadi acuan peneliti untuk mengumpulkan data. Data tersebut berguna untuk menjawab kejadian atau peristiwa yang sedang diteliti. Untuk itu, kualitas

---

<sup>27</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta :PT Grasindo, 2010), hlm. 10.

penelitian sangat bergantung pada data yang telah diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder, sebagai berikut<sup>28</sup>:

**a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumbernya, yaitu diperoleh langsung dari pihak pertama<sup>29</sup>. Data tersebut didapatkan dengan cara mengamati dan mencatat baik dari hasil wawancara dan observasi. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan sehingga peneliti mendapatkan data dari informan secara langsung melalui wawancara terkait dengan implementasi pendanaan, SDM, serta permasalahan yang muncul dan solusi yang ditempuh dalam menjalankan inovasi Sigap-RTLH.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung, yaitu data berasal dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian dan telah tersedia sebelumnya<sup>30</sup>. Data sekunder dapat berasal dari sumber literatur, arsip, laporan, artikel, jurnal, publikasi pemerintah, internet maupun sumber lain yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber, diantaranya publikasi pemerintah, arsip, laporan, dan sebagainya. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber yang memuat informasi tentang implementasi anggaran dan sumber daya manusia dalam keberjalanan Sigap-RTLH di Kabupaten Gresik. Sumber-sumber tersebut mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi tambahan yang tidak didapat dari data primer.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta), hlm. 137.

<sup>29</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta), hlm. 137.

<sup>30</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 137.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian, teknik pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting. Teknik ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan, yaitu sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, teknik yang umum digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut<sup>31</sup>:

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung melakukan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap situasi, kejadian, atau peristiwa di lapangan<sup>32</sup>. Hal ini untuk menemukan fakta baru yang mungkin tidak diungkapkan oleh informan dalam wawancara. Peneliti menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik tentang penggunaan dari aplikasi Sigap-RTLH. Hal ini dilakukan karena yang memiliki akses untuk menggunakan aplikasi Sigap-RTLH hanya tim implementasi Sigap-RTLH. Selain itu, agar peneliti mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaannya.

##### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada informan karena observasi belum cukup untuk memberikan peneliti sebuah data yang lengkap<sup>33</sup>. Pertanyaan yang dilontarkan dapat membawa peneliti untuk memahami lebih dalam pikiran, pendapat, dan perasaan informan tentang

---

<sup>31</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm. 108.

<sup>32</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm. 112.

<sup>33</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm. 118.

situasi, kejadian, atau peristiwa. Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa keterangan yang disampaikan informan terkait dengan implementasi Sigap-RTLH di Kabupaten Gresik dengan fokus pada aspek anggaran dan sumber daya manusia. Wawancara dilakukan dengan melihat dari dua perspektif, yaitu pegawai pemerintah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pengguna (masyarakat) Kabupaten Gresik. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana keberjalanan aspek anggaran dan sumber daya manusia selama implementasi Sigap-RTLH dilakukan. Peneliti juga ingin mengetahui apa saja permasalahan atau hambatan yang muncul.

Tabel 1. 3 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Data yang diperoleh
1.	Farida Haznah Makruf, S.T., M.T.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Data-data terkait implementasi Sigap-RTLH berupa faktor-faktor yang mempengaruhi keberjalanan Sigap-RTLH serta sumber daya manusia yang terlibat. Kemudian, permasalahan ataupun hambatan yang terjadi.
2.	Musnadi, S.Pi., M.M	Sekretaris dinas	Data-data terkait implementasi Sigap-RTLH dari segi aspek anggaran serta permasalahan ataupun hambatan yang terjadi dalam aspek tersebut.
3.	Huda	Perangkat Desa Tumapel, Kecamatan	Informasi mengenai pendapat, kritik, dan saran atas transparansi anggaran dan pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah

		Duduk Sampeyan	Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan Sigap-RTLH.
4.	Vida	Perangkat Desa Lowayu, Kecamatan Dukun	Informasi mengenai pendapat, kritik, dan saran atas transparansi anggaran dan pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan Sigap-RTLH.
5.	Khusnul Khulukiyah	Masyarakat Desa Wedoroanom, Kecamatan Driyorejo	Informasi mengenai pendapat, kritik, dan saran atas transparansi anggaran dan pelayanan yang telah diberikan oleh perangkat desa untuk program perbaikan RTLH.

Sumber : Data diolah

### c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen, seperti arsip, laporan, publikasi pemerintah, gambar, tabel, maupun lainnya yang mendukung penelitian<sup>34</sup>. Dokumentasi menjadi sumber data yang dapat melengkapi hasil observasi dan wawancara. Teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, seperti publikasi pemerintah, laporan, arsip, dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, yaitu aspek anggaran dan sumber daya manusia dalam implementasi Sigap-RTLH. Dokumen-dokumen tersebut

<sup>34</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta), hlm. 240.

sangat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi tambahan, kemudian informasi yang telah terkumpul dianalisis agar menjadi suatu hasil penelitian yang utuh.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dimaksud adalah cara peneliti dalam mengolah data yang telah ditemukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk menganalisis, menafsirkan, dan menelaah data sehingga dapat menghasilkan pemikiran baru yang mampu menjawab fokus penelitian<sup>35</sup>. Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

#### **a. Reduksi data**

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber di lapangan, peneliti mendapatkan banyak data. Data yang semakin banyak dan tidak segera diolah maka semakin menyulitkan peneliti untuk menganalisis. Oleh karenanya, proses reduksi data perlu dilakukan. Reduksi data merupakan proses mengklasifikasikan data kasar yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi lebih sederhana sesuai dengan fokus penelitian<sup>36</sup>.

#### **b. Penyajian data**

Setelah melewati proses reduksi data, tahap kedua yang harus dilakukan adalah penyajian data. Penyajian data merupakan penyampaian data yang telah disederhanakan dalam bentuk teks, tabel, diagram, dan sejenisnya<sup>37</sup>. Penelitian ini menyajikan data dalam bentuk teks untuk menguraikan segala informasi secara jelas dan rinci. Dengan demikian, mudah untuk memahami permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta), hlm. 243.

<sup>36</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta), hlm. 247.

<sup>37</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta), hlm. 249.



### **c. Penarikan kesimpulan**

Tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Hal ini menjadi temuan baru dari penelitian yang belum pernah ada sebelumnya. Kesimpulan didapatkan dengan menganalisis data yang telah diperoleh untuk mencari pemahaman serta jawaban dari rumusan masalah penelitian<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta), hlm. 253.